

# Pengaruh Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

A. Mahendra<sup>1</sup>, Nepriza Br Barus<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Santo Thomas

e-mail: mahendraroshan7@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui Pengaruh Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 23. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 33 Kabupaten/Kota. Sampel pada penelitian ini sebanyak 132. Dari pengujian secara parsial menunjukkan besarnya t 3,051 dengan tingkat signifikansi variabel belanja modal sebesar  $0,003 < 0,05$  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Besarnya t pada variabel dana perimbangan 2,139 dengan tingkat signifikansi  $0,034 < 0,05$  yang artinya Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Persamaan linear berganda yang diperoleh dari hasil pengolahan data adalah  $Y = 21.556 + 0,323 X_1 + 0,401 X_2 + e$  artinya adanya pengaruh belanja modal dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Variabel belanja modal adalah variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai koefisien regresi 0,323. Hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,724 artinya kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel belanja modal dan dana perimbangan sebesar 72,4 % sedangkan 27,6 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata kunci:** Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan

## Abstract

This study aims to explain and determine the effect of capital expenditures and balancing funds on the financial performance of district/city governments in North Sumatra province. The analytical method used is multiple linear regression using the SPSS 23 program. The population of this study is all regencies/cities in North Sumatra Province, totaling 33 regencies/cities. The sample in this study was 132. From the partial test shows the magnitude of t 3.051 with a significance level of capital expenditure variable of  $0.003 < 0.05$  has a positive and significant effect on financial performance. The magnitude of t in the balancing fund variable is 2.139 with a significance level of  $0.034 < 0.05$ , which means that balancing funds have a positive effect on financial performance. The multiple linear equation obtained from the results of data processing is  $Y = 21,556 + 0.323 X_1 + 0.401 X_2 + e$  means that there is an effect of capital expenditure and balancing funds on financial performance in Regency/City Governments in North Sumatra Province. The variable of capital expenditure is a variable that has an influence the greatest impact on the financial performance of district/city governments in North Sumatra Province with a regression coefficient of 0.323. The results showed that the coefficient of determination (R Square) was 0.724, meaning that financial performance can be explained by capital expenditure and balancing funds of 72.4%, while 27.6% is explained by other factors not examined in this study.

**Keywords :** Keywords: Capital Expenditures, Balancing Funds, Financial Performance

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun, mengelola, dan melaksanakan kebijakan serta keuangan daerahnya sendiri (Sujarweni, 2015:231). Diterapkannya Kebijakan Otonomi daerah disebabkan karena ketidakmampuan Pemerintah Pusat untuk mengurus keseluruhan pembangunan daerah, oleh karena itu Pemerintah Pusat melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola dengan mandiri seluruh kepentingan daerahnya (Rosemarry et al, 2016). Penerapan kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerah yang di dapat melalui pemanfaatan potensi-potensi daerah secara mandiri yang nantinya dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah. Halaskova (2016) berpendapat bahwa seluruh potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah berpengaruh terhadap kualitas ruang lingkup pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kinerja keuangan merupakan indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Analisis kinerja keuangan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana alur keuangan suatu pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Darwanis dan Saputra, 2014). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah sangat penting dilakukan mengingat pengaruhnya sangat besar terhadap sektor publik. Pengukuran kinerja keuangan juga dipergunakan sebagai cerminan dalam penilaian akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (Aziz, 2016).

Dalam menilai kinerja keuangan pemerintah, peneliti memilih menggunakan Rasio Kemandirian, dimana pengertian dari Rasio Kemandirian adalah Rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahnya seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Artinya rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal (Mahmudi, 2011).

Peneliti memilih Rasio Kemandirian untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah karena menurut peneliti, dengan menggunakan rasio ini, peneliti lebih mudah dalam menilai dan mengukur kinerja keuangan pemerintah dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan transfer dari pusat atau pinjaman. Hal ini akan langsung menggambarkan bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah, apakah Pemerintah Daerah mampu membiayai sendiri kebutuhan daerahnya atau masih bergantung ke Pemerintah Pusat.

Adapun data Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara**

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Belanja Modal	Kinerja Keuangan
1	2019	Labuhan Batu	Rp.238 729 009 917,00	1,36
	2020		Rp.106 608 134 387,90	1,58
2	2019	Langkat	Rp.134 003 294 300,00	0,66
	2020		Rp.100 212 698 537,00	0,99

Sumber: <http://bpkad.sumutprov.go.id/>

Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan (Halim, 2004:73). Adanya peningkatan belanja modal menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Astiti dan Mimba (2016) menyatakan bahwa jika pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertambah banyak maka akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa pada Kabupaten Labuhan Batu tahun 2019-2020,

Belanja Modal turun dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp.106 608 134 387,90, namun Kinerja Keuangan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 1,58%. Sedangkan dilihat pada Kabupaten Langkat, Belanja Modal pada tahun 2019-2020 turun dari tahun sebelumnya sehingga menjadi sebesar Rp.100 212 698 537,00 namun kinerja keuangan naik sebesar 0,99%. Kesimpulannya adalah hal ini tidak sesuai dengan teori, dimana seharusnya jika Belanja Modal meningkat, Kinerja Keuangan juga seharusnya meningkat.

**Tabel 2. Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara**

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Dana Perimbangan	Kinerja Keuangan
1	2019	Simalungun	Rp.1 630 059 943 143,00	0,11
	2020		Rp.1 582 524 160 241,00	0,09
2	2019	Gunung Sitoli	Rp. 559 094 823 827,00	0,06
	2020		Rp. 529 186 588 779,00	0,04

Sumber: <http://bpkad.sumutprov.go.id/>.

Dana perimbangan adalah yang bersumber dari penerimaan anggaran APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah ( Halim 2004:69). Dana Perimbangan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk kebutuhan daerahnya, sehingga akan membuat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menurun (tri yuni 2018).

Dari Tabel 2 dapat dilihat pada Kabupaten Simalungun tahun 2019-2020 Dana Perimbangan turun menjadi Rp.1.582.524.160.241,00 dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun juga turun menjadi 0,09%. Sedangkan dilihat pada Kota Gunung Sitoli tahun 2019-2020, Dana Perimbangan turun menjadi Rp.529.186.588.779,00 dan Kinerja Keuangan juga turun menjadi 0,04%. Kesimpulannya adalah hal ini tidak sesuai dengan teori, dimana seharusnya jika Dana Perimbangan meningkat, Kinerja Keuangan Pemerintah menjadi turun/merosot.

Penelitian yang dilakukan oleh (harumiati dan Payamta, 2014) menemukan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andirfa et al,2016),(Mulyani dan Wibowo,2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh ( Antari dan Sedana,2018)mendapatkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Budianto,2016) dan (Anggreni,2019) menemukan hasil yang sama bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupatn Deli Serdang.

#### **Kerangka Berfikir**

Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh daerah yang tercermin dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan banyaknya infrastruktur dan sarana prasarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang dihasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

Menurut (Halim,2007), Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Perkembangan pembangunan dan penambahan aset diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan serta meningkatkan modal bagi kinerja pemerintah daerah yang berdampak pada semakin

meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Masyarakat yang diwakilkan oleh legislatif selaku principal bagi Pemerintah Daerah, harus terus melakukan kontrol terhadap pemerintah dalam proses pelaksanaan anggaran. Anggaran sangat sensitif karena realisasinya selain harus sesuai dengan tujuan juga bagaimana tingkat efisiensi, efektivitas dan nilai ekonomis dari anggaran tersebut. Salah satu anggaran yang menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat adalah belanja modal. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri (Adi,2017).

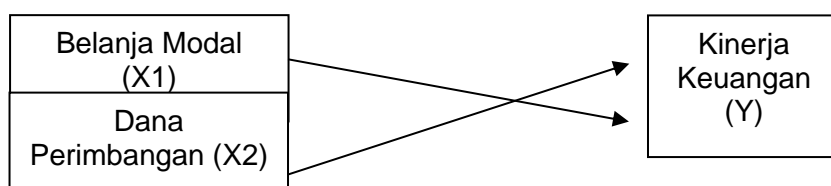
Dalam penelitian Anggraeni(2016), menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten Sleman. Juga pada penelitian Susanti (2017) menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah. Dana perimbangan terdiri atas 3 bagian yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bertujuan untuk membiayai kelebihan dari belanja daerah ( Sutama & Ismawanti, 2018).

Menurut Widjaja (2008:129) Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Tercapainya kesejahteraan masyarakat akan mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah mampu mengelola daerahnya dan akan meningkatkan kinerja keuangan. Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal yaitu kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi.

Berdasarkan penelitian yanto (2014) menunjukkan bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009-2013. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian juliawati (2012) yaitu, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh tahun 2009-2011. Namun kedua penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah& Sari (2015) yang menunjukkan bahwa, Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan dan di Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2007-2013.

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti membuat kerangka berfikir sebagai berikut.



### Hipotesis

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H1: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan secara parsial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

H2: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan secara parsial pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

H3: Belanja Modal dan dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

## METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan teknik dokumentasi dengan pencatatan dan perhitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan. Sumber Data yang digunakan adalah dari laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2021 yang diperoleh dari situs resmi BPKAD Sumatera Utara yaitu <http://bpkad.sumutprov.go.id/>. Metode analisis data merupakan metode yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis, data diberi arti dan makna berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam menganalisis pengaruh dari Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan digunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan variabel independen yaitu Belanja Modal dan Dana Perimbangan dan variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan. Untuk menguji data dan juga hipotesis penelitian maka dilakukan beberapa pengujian dengan bantuan software SPSS versi 23. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yaitu menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		132
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.75947617
	Most Extreme Differences	Absolute Positive
Negative		-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		.977
Asymp. Sig. (2-tailed)		.295

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil output SPSS 23(2022)

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan uji *Kolmogorov Smirnov* adalah sebesar 0,295 yang nilainya lebih tinggi dari 0.05 sehingga peneliti menyimpulkan data ini telah berdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinearitas

Dalam mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas antar variabel independen pada model persamaan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai tolerance. Dimana jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Erlina, 2011: 102). Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam output SPSS maka besarnya VIF dan nilai tolerance dari masing-masing variabel independen dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	21.556	4.441		-4.854	.000		
Ln_X1	.323	.106	.284	3.051	.003	.741	1.349
Ln_X2	.402	.188	.199	2.139	.034	.741	1.349

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Output SPSS 23 2022

Pada tabel 4. diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF variabel penelitian lebih kecil dari 10 yaitu 1,349. Adapun nilai *tolerance* variabel penelitian lebih besar dari 0,10 dengan nilai tolerance 0,741. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

### Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi.

### Uji t

Uji statistik t dilakukan untuk melihat seberapa jauh satu variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Apabila nilai signifikansi < dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

**Tabel 5. Hasil Uji t**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	21.556	4.441		-4.854	.000		
Ln_X1	.323	.106	.284	3.051	.003	.741	1.349
Ln_X2	.402	.188	.199	2.139	.034	.741	1.349

Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Output SPSS 23(2022)

Hasil pengujian statistik t hitung pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Belanja Modal

Dari hasil perhitungan uji parsial, diperoleh nilai t hitung sebesar  $3,051 > 1,69236$  dengan nilai signifikan Belanja modal sebesar  $0,003 < 0,050$  menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan maka,  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

## 2. Dana Perimbangan

Berdasarkan nilai output uji parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 2,139 >1,69236 dengan nilai signifikansi Dana perimbangan sebesar  $0,034 < 0,05$  menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan, maka  $H_2$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Artinya dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

### Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Jika nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi tidak fit. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$  maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa model regresi fit.

**Tabel 6. Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.226	2	8.113	13.849	.000 <sup>b</sup>
	Residual	74.985	128	.586		
	Total	91.210	130			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), Ln\_X2, Ln\_X1

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa hasil perolehan F hitung > F tabel yaitu sebesar 13.849 > 3,32 dengan tingkat signifikansi  $0.000 < 0.05$ , maka berdasarkan uji F dalam penelitian ini diketahui bahwa  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk menguji kemampuan model regresi variabel penelitian. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.851 <sup>a</sup>	.724	.720	.2297	1.643

a. Predictors: (Constant), Ln\_X2, Ln\_X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Output SPSS 23 (2022).

Menurut Ghazali (2016), peneliti dianjurkan untuk menggunakan nilai  $R^2$  pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik karena R dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Berdasarkan tabel 7 di atas, nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.724 atau 72,4%. Hal ini berarti variasi variabel dependen adalah sebesar 72,4%, sedangkan sisanya sebesar 27,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini dilihat dari hasil perhitungan uji parsial diperoleh nilai thitung sebesar 3,051 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung > ttabel ( $3,051 > 1,69236$ ). Maka H1 yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan diterima dan H0 ditolak. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan Abdul Rohman (2012) serta Ratria Patrati (2010) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan semakin meningkatnya alokasi Belanja Modal menunjukkan peningkatan investasi yang dilakukan sehingga semakin tinggi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Belanja modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan memberikan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat.

Pengelolaan Belanja Modal yang baik dari segi manajer di suatu entitas pemerintah di daerah yaitu kepala daerah harus paham betul asas yang berlaku serta ukuran kinerja untuk menilai keberhasilan setiap kegiatan yang dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. Adapun ukuran keberhasilan dari segi Belanja Modal menurut (Abdul Halim, 2014) adalah lima tepat yaitu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Sehingga banyaknya dana yang dialokasikan untuk Belanja Modal, maka akan nantinya dapat mewujudkan terciptanya infrastruktur dan sarana yang semakin baik kedepannya.

Tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi di berbagai sektor dan produktivitas masyarakat semakin tinggi dan terjadi peningkatan kesejahteraan. Sementara itu apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah maka nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian Belanja Modal secara tepat dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah. Selain itu, pengalokasian yang lebih banyak pada belanja modal nantinya juga akan dapat membantu masyarakat dalam pembangunan dan juga diharapkan diperolehnya sumber-sumber keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan di daerah itu.

### **Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini dilihat dari hasil perhitungan uji parsial diperoleh nilai thitung sebesar 2,139 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung > ttabel ( $2,139 > 1,69236$ ). Maka H2 yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan ditolak dan H0 diterima.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tri Yuni, 2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Julitawati dan Darwanis, (2016) juga sejalan dengan penelitian di atas yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budiarto,(2016) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah yang ada di Sulawesi Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah,(2015) juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarto, (2016) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan pada



Provinsi Sumatera Selatan.

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat ikut membantu dengan memberikan dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, adanya kewajiban pemerintah pusat kepada daerah yang masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan dana perimbangan untuk mempercepat pembangunan daerah.

Berkaitan dengan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta adanya kewajiban untuk menjaga ketercapaian standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi atau Dana Perimbangan agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu, dengan adanya Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, semakin besar dana yang diterima oleh daerah dari pusat akan memberikan tingkat kinerja keuangan yang semakin membaik.

Dana Perimbangan sebagai salah satu elemen desentralisasi fiskal menjadi elemen penting bagi Pemerintah Daerah untuk menutup pembiayaan daerah. Dana Perimbangan dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah bersifat "block grant", yang artinya daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah.

Jadi kesimpulannya, jika Dana Perimbangan naik kinerja keuangan juga akan ikut naik, karena dengan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat, itu akan dapat membantu pembiayaan daerah, seperti pembangunan infrastruktur dan belanja daerah lainnya, dan jika kebutuhan daerah dapat tercukupi oleh bantuan dana dari pusat, otomatis akan dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara**

Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh Belanja Modal dan Dana Perimbangan. Adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0,724 atau 72,4 % yang artinya kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh Belanja Modal dan Dana Perimbangan sebesar 72,4 %. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel Belanja Modal dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Belanja Modal mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah daerah, dengan alasan bahwa Belanja Modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan Dana APBN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi Belanja Daerah lebih tinggi daripada pendapatan yang dihasilkan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah, maka

pemerintah pusat akan memberikan bantuan dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, adanya kewajiban Pemerintah Pusat kepada daerah masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan Dana Perimbangan untuk mempercepat pembangunan di suatu daerah tertentu.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan

Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Maka H1 yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan diterima dan H0 ditolak.

Dana Perimbangan Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Maka H2 yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan ditolak dan H0 diterima.

Berdasarkan uji F dalam penelitian ini diketahui bahwa H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Uji Determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,724 atau 72,4 % yang artinya kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh Belanja Modal dan Dana Perimbangan sebesar 72,4 % dan sisanya sebesar 27,6% dijelaskan oleh variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, leverage dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Abdullah, 2015. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Andirfa, M., Basri. H., Shabri, M. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. V(3). 30-38.
- Antari, Sedana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. ISSN:2302-8912
- Astiti, Desak Nyoman Yulia, dan Ni Putu Sri Harta Mimba. 2016. Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E- jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8559 Hal: 1924-1950.
- Aziz, Asmaul. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). Skripsi, Universitas Islam Majapahit Mojokerto.
- Budianto, & Alexander, S. W. 2016. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*. Vol.4 No.4 Hal. 844-851 .
- Budianto, & Alexander, S. W. 2016. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*. Vol.4 No.4 Hal. 844-851 .
- Darwanis dan Saputra. 2014. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh) .*Jurnal Dinamika dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 183.
- Halaskova, Martina and Renata Halaskova. 2016. Assessment of Financial Capabilities of Local Governments in EU Countries for the Development of Local Publik Services. *Journal of Local Self-Government*, 14 (3): 379- 397.
- Harumiati, Y. Dan Payamta 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di indonesia Tahun Anggaran 2011. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 3(2), 75-87.

- julitawati, Ebit., Darwanis., Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi*, 1 (1): 15-29.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mulyani, Sri & Hardiyanto Wibowo. 2017. "Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015)". *KOMPARTEMEN*, Vol. XV No. 1.
- Pratiwi, Tri Yuni 2018 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Kuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. S1 thesis, Fakultas Ekonomi.
- Rosemary, Chinyeaka Justine dan Barisua Barry. 2016. *Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil*. *Arabian Journal of Bussiness and Management Review (OMAN Chapter 5:10)*
- Sujarweni, V.W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Press.
- Susanti. 2017. *Kinerja dalam Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap*. Disertasi Program Studi Administrasi Universitas Negeri Makassar.